PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 12 September 2025

Nomor : 800.1.2.5/6089/204.2/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Kepmenpan Kebutuhan PNS dari Lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025

Yth. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
di
Tempat

Menyusuli Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.5/4024/SJ tanggal 23 Juli 2025 hal Pengangkatan CPNS bagi Lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025, dengan hormat bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 556 Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025 hal Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan IPDN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Mengacu pada ketentuan angka 1, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan Keputusan Pengangkatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 yang semula TMT 1 September 2025 **diubah menjadi TMT 1 Oktober 2025.**
3. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk dokumen pemberkasan dapat diambil pada BKD Provinsi Jawa Timur;
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon untuk:
   a. Segera mengajukan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan **TMT 1 Oktober 2025**;
   b. Menetapkan keputusan pengangkatan CPNS Lulusan IPDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Menyiapkan pendanaan untuk penggajian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS Lulusan IPDN yang dibebankan pada anggaran masing-masing Pemerintah Pusat dan Daerah;
   d. Menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri terkait Penetapan Keputusan Pengangkatan CPNS Lulusan IPDN paling lambat 1 November 2025.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

5. Selanjutnya penghadapan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXXII dilakukan sesuai **TMT 1 Oktober 2025** dengan alokasi penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;**

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami lampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 556 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 556 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.2.1/4655/SJ tanggal 21 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah sejumlah 1.110 (seribu seratus sepuluh) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Menteri ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI
NOMOR 556 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
LULUSAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	JUMLAH SELURUHNYA				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	JUMLAH				
	JUMLAH				
	JUMLAH				
	JUMLAH				
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	DHEA AKMAL YON DARYONO	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
2		FAIZ JASTIS SERIN SUPRIATNA	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
3		TEGAR IRZA AULIANSYAH BUDI	KONSELOR SDM	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMU
4		SULTHAN RAFI ANWAR	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
5		RAYHAN ALIF DARMAWAN	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
6		VIOLLA NUZULIA ARRASYA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. GRESIK	DIAZ IRHAMSYAH HANDARIFKAN	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
2		REINALDY FAUZAN HILMY RAMSY.S.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO	RIZKY PUTRI AULIA	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MOJOKERTO
2		SHELSYA DIVA OKTAFIANDA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	PEMERINTAH KAB. SIDOARJO	MUHAMMAD ILHAM MAULANA	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
2		RIDHO AHMAD FIRMANSYAH	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO
3		SHERINA NURLAILA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJ
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. JOMBANG	ADHE PRAYOGA SETYO ADJI	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG
2		MEI SUSANTI	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. SAMPANG	ACHMAD YUDHA HERYANA	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
2		ATORI AZIZ MAULIDANA	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN	ANNISA FATIMATUL FIRDAUSI PUTRI	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. SUMENEP	AKHMAD FAIZUL FAJRI	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
2		YUDA MARTHA PRASETYA	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. BANGKALAN	ABDUL LATIEF FATHONI	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALA
2		MOH. ARIS ARDIANSYAH	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO	INDAH NURIZZA SHAFIRA	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONDOWOSO
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	ANGGA MAHENDRA PUTRA JUNIARTO	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	DIKKY PRIMADANA	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
2		MOCHAMAD NOOR ALFARIDZY	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. JEMBER	MUHAMMAD AGIL AL FURQON	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER
2		NABILA DINDA DEVI AULIA	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER
3		RENDHY RAFIQURRAHMAN	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. MALANG	ANANDA ZOGA SYAHPUTRA	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
2		ARISTITO SATRIA ARYADHANA	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
3		CRISTIN CLAUDYA TURNIP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. PASURUAN	BAGAS BINTANG SAPUTRA	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN
2		YUSRON AROFAH	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO	LAFADZ MALIK FAHLEFI	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
2		LAILATUL AZIZAH	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. LUMAJANG	CINDY MELANIA MAHARANI LESMANA	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
2		PANUT MAHALOKA SUTRISNO	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	MUSTAMI' TSALISA FATA	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV KEUANGAN PUBLIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEDIRI
2		PUTRIANA BETRIX	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEDIRI
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG	ANITA NUR LAILA OKTAVIA	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUN
2		WAHDANIA AMALIA ROSA	PRANATA KEWILAYAHAN	D-IV KEUANGAN PUBLIK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. NGANJUK	COLLIA NAWANG PUTRI	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV KEUANGAN PUBLIK	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
2		ILMIAH QOLBI AKBAR	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK	NADILA CAURITA	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. BLITAR	RICHO GUNAWAN LINGGARJATI	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
2		SULTAN MUHAMMAD FIKRI	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. MADIUN	ARIF SUNU PAMUNGKAS	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. NGAWI	ISNA HUSNUL MAR'ATI ARDIANA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. MAGETAN	ALFIN MUHAMMAD FARID ANUAR	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. PONOROGO	AHMAD ABDUL BASITH	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PONOROGO
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	PEMERINTAH KAB. PACITAN	MAYDAY YETI KAWADISI	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITA
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	FONITA AYU SAFRIANA	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
2		ROSIDA AYUNITA WIJAYANTI	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. TUBAN	ALFIAN DWI REFANDI	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
2		MUHAMMAD RAFI RENATA	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KAB. LAMONGAN	MARSHA ARUM SALSADILA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2		MUCHAMMAD REZAL ARDIANSYAH	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	ANGELYA DEANITA ANDRIANA PUTRI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV KEUANGAN PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SURABAYA
2		FIKRI AULIYA RAHMAN	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN UMUM, PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
3		NATASYA DINDA SEPTI ANDINI	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
4		VERDIO WIRADINATA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	KINTA RISA ASYIFA	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	INSPEKTORAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA MALANG	ILHAM PRATAMA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	AHMAD FARHAN DWI SENTONO	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PASURUAN
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	FEBRYAN CAHYO PRAYOGO	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KELURAHAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA BLITAR	DEWI FORTUNA	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV KEUANGAN PUBLIK	SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA KEDIRI	ILHAM FATHIR AHMADY	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN	SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA MADIUN	DAFFA FADILA SATRIATAMA	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH KOTA MADIUN
	JUMLAH				
1	PEMERINTAH KOTA BATU	ADAM ZULKARNAEN	ENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV KEUANGAN PUBLIK	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU
	JUMLAH				

NO	NAMA INSTANSI	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
	JUMLAH				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI